

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi 2010*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Bastian, I. dan Soepriyanto, G. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Chariri, A. dan Ghozali, I. (2003). *Teori Akuntansi*. Semarang: BP UNDIP.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Cetakan IV Penerbit UNDIP
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S.S. (2008). *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodeologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_. (2008). *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hendrikson, D, Eldon and Michael F. Van Breda. (2002). *Teori Akuntansi*. Edisi V. Buku 2. Batam : Interaksara
- Husnan, S. dan Pudjiastuti, E. (2006). *Dasar-dasar Manaemen Keuangan*. Yogyakarta : UPP SIM YKPN Kustiawan, Memen. (2009). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah*. Bandung. Rizqi Press.

- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka
- Program Studi Pendidikan Akuntansi. (2007). *Pedoman Operasional Penulisan Skripsi (POPS)*. Bandung: Program Studi Pendidikan Akuntansi UPI.
- Riduwan. (2010). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Mahasiswa*. Bandung : Alfabeta
- Sudjana. (2003). *Teknik Regresi dan Korelasi*. Bandung : Tarsito
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta. Yogyakarta. BPF
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedi Widia Sarana Indonesia

## JURNAL

- Halim, A., dan Abdullah, S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1 pp 53-64.
- Martani, D., dan Liestiani, A. (2010). *Disclosure Of Local Government Financial Statement In Indonesia*. Accounting Department, University of Indonesia. Proceeding in 2010 Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA) November 28 – December 1, 2010 The Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand.
- Jensen, Michael C. & Meckling, William H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.

Naim, A. dan Rakhman, A. (2000). *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15: 70 – 82.

Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities*. Journal Public Policy January 2010

Zul Hilmi, Amiruddin dan Martani, D. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional Akuntansi XV.

## **TESIS**

Lesmana, S. I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia*. Tesis. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

Perwitasari, C. (2010). *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Mandasari, P. (2009). *Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government*. Tesis. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

## **SKRIPSI**

Sumardjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Empiris pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ayuningtyas, R. R. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Trimuharmi, R. (2010). *Pengaruh karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nasharuddin, R. (2010). *Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Pendidikan Indonesia.

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2000). *Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2003). *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2004). *Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2004). *UU RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : DPR RI

Presiden Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : DPR RI

\_\_\_\_\_. (2005). *Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Jakarta : Sekretaris Negara RI

\_\_\_\_\_. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*. Jakarta : Sekretaris Negara RI

\_\_\_\_\_. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Sekretaris Negara RI

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). *Konsep Pedoman Good Public Governance*. Jakarta : KNKG

## **DOKUMEN**

Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010*. Bandung : BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

## **SUMBER DARI INTERNET**

Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). *91 % Laporan keuangan Pemda buruk*. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). [Online]. Tersedia: <http://www.bpk.go.id/web/?p=10013>. [2 Maret 2012].

Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). *BPK RI Memberikan Opini WDP terhadap LKPD Enam Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar*. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). [Online]. Tersedia: <http://bandung.bpk.go.id/web/?p=1784>. [12 Maret 2012].

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.(2012). *Kependudukan*. [Online]. Tersedia: <http://bpsjabar.bim.web.id>. [30 April 2012]

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sekilas Jawa Barat*. [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id). [Online]. Tersedia : <http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1093>. [30 April 2012]

Ariwibowo, Fajar. (2008). *Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas*. [Online]. Tersedia : <http://ar1bowo.multiply.com/journal/item/12/Laporan-Keuangan-Daerah-Perlu-Akuntabilitas>. [1 Oktober 2012].